

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tingkat Kemiskinan

Menurut Rusitha (2021), kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan dalam pendapatan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Menurut Diyah dan Adawiyah (2020), kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor, termasuk ketidakadilan struktural. Faktor struktural merupakan sebuah ketimpangan dalam distribusi sumberdaya dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi terbatas. Kemiskinan dapat memberikan dampak yang luas seperti kualitas hidup yang rendah, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi terbatas, serta meningkatnya risiko terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Johnston (2018), menyatakan bahwa komunitas dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung menghadapi tantangan seperti tingginya tingkat kejahatan dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial. Terdapat dua pengukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari kemiskinan mutlak (absolut) dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut berdasarkan BPS (2024), ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah sebagai ukuran finansial

dalam bentuk uang dan nilainya yaitu garis kemiskinan. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan menggunakan *Head Count Indeks* (HCI), dengan menghitung persentase orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut Safitri (2019), kemiskinan relatif merupakan ukuran kemiskinan yang melihat pada pembagian pendapatan. BPS (2024), menyatakan kemiskinan relatif adalah kondisi miskin akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk yang terjadi di wilayah tersebut. Garis kemiskinan tidak dapat menjadi perbandingan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.2. Sumber Daya Alam

Menurut Atika (2021), sumber daya alam merupakan kekayaan alami (*raw material*) yang terjadi di alam dan dapat digunakan dalam produksi atau konsumsi ekonomi. Kekayaan alam ini dapat memberi manfaat dalam penggunaan melalui penyediaan bahan baku dan energi yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dibagi menjadi empat kategori yaitu sumber daya mineral dan energi, sumber daya tanah, sumber daya air dan sumber daya hayati. Peran dari pemerintah daerah terkait pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam di daerahnya merupakan hal yang penting untuk asas desentralisasi.

Menurut Joko dan Tim Peneliti (2017), adanya *natural resource curse* atau kutukan sumber daya alam merupakan suatu fenomena. Fenomena kutukan dapat

terjadi pada saat negara dianugerahi kekayaan sumber daya alam, tetapi terdapat permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat yang memburuk. Fenomena kutukan sumber daya alam ini terjadi di Indonesia dalam otonomi daerah, yang dimana pada saat suatu daerah memiliki penerimaan yang besar dari kekayaan sumber daya alam namun memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif rendah serta indikator pembangunan yang buruk. Di Indonesia, banyak daerah yang memiliki kekayaan SDA besar, oleh karenanya wajar jika mereka juga terindikasi mengalami kutukan SDA. Kekayaan SDA yang ada tersebut bahkan masuk dalam kategori melimpah. Bukan hanya minyak dan gas (migas) serta batu bara, Indonesia juga dianugerahi berbagai jenis sumberdaya mineral lainnya seperti tembaga, emas, nikel dan timah. Menurut Atkinson (2003), menunjukkan bukti bahwa kutukan SDA adalah bukti nyata ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola penerimaan yang besar dari SDA secara berkelanjutan.

2.3. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Menurut Direktorat Dana Perimbangan (2017), secara teoritis dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sesuai amanat undang - undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dana tersebut kemudian dapat dialokasikan berdasarkan angka persentase tertentu guna mendanai keperluan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan dua prinsip yaitu prinsip *by origin*, dana bagi hasil dapat dialokasikan. Artinya, pada saat daerah penghasil memiliki

bagian dengan persentase penerimaan yang besar dari negara dan daerah lain dalam satu provinsi juga memiliki bagian dengan persentase berdasarkan pemerataan.

Dana bagi hasil yang berdasarkan prinsip *by actual*. Memiliki arti bahwa besarnya DBH dapat disalurkan kepada daerah, naik daerah penghasil maupun daerah yang mendapat alokasi pemerataan yang didasarkan atas realisasi saat penyeteroran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan. Hal tersebut diatur dalam undang – undang nomor 33 tahun 2004 pasal 23. Pada dasarnya, dana bagi hasil sumber daya alam memiliki lima jenis yang terdiri dari : 1) DBH Minyak Bumi dan Gas bumi, 2) DBH Pertambangan Umum/Mineral dan Batu Bara, DBH Pengusahaan Panas Bumi, DBH Kehutanan dan DBH Perikanan.

2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arniati (2022), pertumbuhan ekonomi dapat menjadi permasalahan makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah kemampuan suatu negara dalam meningkatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun perkembangan jumlah produksi seperti barang dan jasa, tidak berbanding lurus dengan pertambahan produksi barang dan jasa yang besarnya sama. Potensi pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dari potensinya karena pertambahan potensi produksi lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Terdapat dua teori mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu teori klasik dan teori neoklasik.

Teori ekonomi klasik menurut Adam Smith, menyatakan bahwa sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi dan membawa ekonomi pada *full employment* serta menjamin pertumbuhan ekonomi pada posisi stasioner. Berdasarkan buku yang berjudul “*An Inquiry Into the Nature and Causes of the Weakth of Nations*” berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan penduduk karena bertambahnya jumlah penduduk, maka dapat meningkatkan produksi. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Solow berpendapat bahwa, faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi yaitu membutuhkan peran manusia, akumulasi modal, teknologi yang modern dan output. Meskipun pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penting untuk memanfaatkannya secara optimal sebagai sumber daya yang bermanfaat.

2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2023), Indeks Pembangunan Manusia telah digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 agar manusia dapat hidup sehat dan panjang umur, mendapatkan pengetahuan, serta memiliki akses terhadap peluang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak. UNDP menyusun sebuah indeks sebagai ukuran dari capaian pembangunan manusia. Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dijelaskan dan diperkenalkan sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). UNDP pertama kali memperkenalkan IPM pada tahun 1990 melalui publikasi “*Human Development Report 1990*”. Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu negara.

Dalam mengukur kemajuan sebuah pembangunan di suatu negara atau wilayah dapat menggunakan IPM. Konsep yang terdiri atas dasar tiga hakikat utama jati diri manusia, membuat IPM mampu menjelaskan kemajuan manusia secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan dari waktu ke waktu dan antarwilayah yang berbeda. Selain itu, capaian IPM antarwilayah dapat digunakan untuk memandu pemangku kebijakan dalam menyusun skala prioritas pembangunan wilayah di suatu negara. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi dari peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan global yang ingin meniadakan satu individu di mana pun di dunia ini yang tertinggal. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah sebuah rencana aksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi sebagai tempat tinggal manusia, dan memastikan bahwa semua orang memperoleh keadilan dan kemakmuran yang layak.

2.6. Penelitian Terdahulu

Bambang (2018) menganalisis mengenai faktor – faktor kemiskinan pada era desentralisasi fiskal di Kalimantan Timur pada tahun 2011-2015. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari variabel sumber daya alam terhadap kemiskinan.

Indah (2024) menganalisis pengaruh dana otonomi khusus dan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemiskinan di Aceh pada tahun 2017-2021. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari variabel dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemiskinan.

Suharlina (2020) menganalisis pengaruh investasi, pengangguran, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat pada tahun 2013-2017. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Azizah dan Asiyah (2022) menganalisis pengaruh jumlah penduduk, IPM, PDRB, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2017-2021. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari variabel IPM terhadap kemiskinan.

Iqbal Salsabil dan Westi Rianti (2023) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2016-2020. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Qudri (2023) menganalisis pengaruh dana desa, PDRB, dan IPM terhadap kemiskinan di Aceh pada tahun 2016-2022. Analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari variabel IPM terhadap kemiskinan.

